

**WAWANCARA PADA DINAS KESEHATAN TENTANG UPAYA PEMERINTAH  
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP  
MASYARAKAT DAN RSUD CENKARENG**

Saya : Bagaimana kewenangan Pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan kepada pasien rumah sakit?

Dikes : Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah yang tercantum dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, termasuk bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik disegala bidang dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mampu meningkatkan daya saing dengan daerah lain dengan memperhatikan prinsip demokrasi sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah diharapkan dapat menjadi aparatur pemerintah yang dapat bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada masyarakat.

Saya : Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng?

Dikes : Rencananya Pemerintah akan membangun gedung rumah sakit yang baru yang lebih memadai, tapi sebelum itu terealisasi Pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis agar dapat melayani masyarakat/pasien dengan maksimal dan beberapa yang ditemukan yaitu kurangnya dokter spesialis pada RSUD Cengkareng.

Saya : Bagaimana upaya Pemerintah jika terdapat banyaknya aduan dari pasien atau masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit?

Dikes : Pemerintah dalam hal ini rencananya akan datang lagi ke beberapa rumah sakit yang diketahui telah melakukan beberapa pelanggaran kepada pasiennya, seperti membedakan pelayanan kesehatan kepada pasiennya yang dilihat dari pengguna jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan swasta (BPJS Kesehatan dan Prudential atau asuransi swasta lain). Pemerintah akan menegur dan memberikan penyuluhan kepada pihak rumah sakit agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut, walaupun Pemerintah sendiri sudah pernah datang ke beberapa rumah sakit sebelumnya.